ARAH BARU PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

By TRIWAHYUNINGSIH
PROCEEDING
INTERNATIONAL SEMINAR

Pendidikan Kewarganegaraan
Sebagai Bidang Keilmuan dan Program Pendidikan
Dalam Konteks Penguatan Daya Saing Lulusan

Selasa, 15-16 November 2016
Gedung Achmad Sanusi
Universitas Pendidikan Indonesia

Editor:
Sapriya
Syafullah
Susan Fitriasari
Leni Anggraeni
Dede Iswandi
Dwi Iman Muthaqin
Diana Noor Anggraini
Riyan Yudistira
Proceeding Internasional Seminar

Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Bidang Keilmuan
dan Program Pendidikan Dalam Konteks Penguatan
Daya Saing Lulusan

Selasa, 15-16 November 2016
Gedung Achmad Sanusi
Universitas Pendidikan Indonesia

Editor:
Sapriya
Syafullah
Susan Fitriasari
Leni Anggraeni
Dede Iswandi
Dwi Iman Muthaqin
Diana Noor Anggraini
Riyan Yudistira

LABORATORIUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Prosiding Seminar Internasional
Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Bidang Keilmuan dan Program Pendidikan
Dalam Konteks Penguatan Daya Saing Lulusan


Editor:
Sapriya
Syafifulla
Susan Fitriani
Leni Anggraeni
Dede Iswandi
Dwi Iman Muthaqin
Diana Noor Anggraini
Riyan Yudistira

Penerbit
Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Universitas Pendidikan Indonesia
Jl. Dr. Setiabudhi No 229 Bandung
PENGANTAR EDITOR


Semangat yang hendak dibangun melalui kegiatan Kongres dan Seminar Internasional ini adalah refleksi kritis dari para komunitas akademik PKn dan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat, untuk bersama-sama memberikan kontribusi pemecahan persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam rangka membangun kemandirian dan martabat bangsa Indonesia.

Ide awal dari kegiatan AP3KNI kali ini adalah menyamakan visi dan misi organisasi yang berorientasi pada program aksi nyata dari seluruh komunitas akademik PKn dan untuk menjaga eksistensi serta berkelanjutan program yang dituangkan dalam tulisan-tulisan dalam prosiding ini.

Pada kesempatan ini, tim editor menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama, sehingga prosiding ini dapat diterbitkan dengan baik. Tidak lupa dengan segala kerendahan hati, kami sampaikan permohonan maaf apabila dalam prosiding ini masih terdapat hal-hal yang dirasa belum memadai atau sesuai dengan harapan.

Untuk itu, demi penyempurnaan prosiding ini, kami sangat berharap sambang saran atau masukan yang konstruktif dari para pembaca yang budiman. Kami sangat berbesar hati untuk menerima saran tersebut.

Selamat membaca

Bandung, 7 November 2016

Tim Editor,
NAWACITA:
ARAH BARU PENDIDIKAN KEWARGANEGERAAN DI INDONESIA

Ardian Bakhtiar Rivai
Universitas Ahmad Dahlan
ardian.rivai@ppkn.uad.ac.id

Triwahyuningsih
Universitas Ahmad Dahlan
triweppknuad@yahoo.com

Susena
Universitas Ahmad Dahlan
ihsusen@gmail.com

Abstrak

Kata Kunci: Pendidikan, Kewarganegaraan, Nawacita.

This article aims to promote the concept of new orientation for civics education in Indonesia. A new orientation on this idea based on nine paradigms which directed the Indonesian government. Nine principles which contain in Nawacita use to concept of methodology in this article for answer all of urgent problem on civics education in Indonesia. In conclusion, civics education must make people feel free from ritual and doctrine which make limited thinking. Civics education must interpret for processes to destructing the walls of formalism which argue that civics education only for duties not for needs.

Keyword: Civics, Education, Nawacita

Pendahuluan

Nawacita sebagai hutang konstitusi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah arah politik dan pemerintahan yang ditempuh oleh segenap warga negara Indonesia saat ini. Dengan menyandarkan diri pada konsep tersebut, artikel ini bertujuan menjawab pertanyaan besar tentang *Quo Vadis Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia?*. *Quo vadis* yang dalam bahasa Latin bermakna “mau dibawa kemana” adalah pertanyaan paling mendasar yang akan dijawab dalam tulisan ini. Artikel ini ditulis karena terinspirasi konsep pemikiran oleh (Diaz & McGee, 2006) tentang model manajemen ilmu pengetahuan terbuka yang sangat terkenal dan berkembang dengan sangat pesat di The University of Arizona, USA.

Untuk bisa memahami *Nawacita* yang menjadi visi besar Presiden saat ini, ada baiknya kita lepaskan dulu atribut politik yang melekat pada diri sebagai pendidik. Bahwa kemudian, orientasi politik yang secara subjektif berbeda dengan *status quo* saat ini, turut menunjuaskan pemerintahan yang berdaulat yang bernama Indonesia, adalah tanggung jawab dan kerja gotong royong secara komunal. Artikel ini tidak bermaksud mengabaikan orientasi politik yang bertolak belakang dengan pemerintahan *quo*, tetapi lebih mengajak seluruh pemangku kepentingan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sebagai bagian yang integratif dalam mengarahkan mata pelajaran ataupun mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang sesuai dengan tuntutan rezim dan zaman.


Kedua, masalah yang masih dihadapi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia saat ini adalah masih dominanya pemahaman yang menurut Benedict Anderson disebut sebagai *imagined communities*. Dalam konsep masyarakat imajinatif, nasionalisme adalah hasil konstruksi sejarah budaya manusia (Greenfeld & Eastwood, 2005). Konsekuensi yang diikutkan oleh Benedict Anderson tentang masyarakat yang imajinatif ini hanya akan melahirkan generasi yang tidak


Bandung, 15-16 November 2016
Gedung Achmad Sanusi Universitas Pendidikan Indonesia

Nawacita: Ijtihad Menjawab Masalah Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia

Ijtihad awal yang penulis lakukan untuk menjawab empat masalah seperti yang sudah dikemukakan di pendahuluan, nampaknya wacana Nawacita sebagai arah baru Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia saat ini sangat relevan untuk digaungkan. Pada hakikatnya, mewacanakan arah baru bukan berarti meninggalkan nilai-nilai luhur yang sudah bertahan tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang sedang dan sudah dilakukan saat ini. Tawaran gagasan ini hanya bentuk formula yang bisa menyempurnakan paradigma Pendidikan Kewarganegaraan di masa sekarang dan yang akan datang.


Model kedua, arah pembayaran yang berpusat pada guru. Model ini menginspirasi kita sebagai pendidik untuk lebih banyak membagi sumber belajar dan praktik yang sudah sukses diterapkan, sehingga pengajaran lebih banyak menunjukkan improvisasi aktifitas yang melahirkan objek pembelajaran yang haus akan kreasi sebagai stimulus produksi (Diaz & McGee, 2006).

Model ketiga, arah pembayaran yang berpusat pada siswa. Model ini membuka peluang pembelajar untuk memiliki akses yang beragam dalam rancangan yang berbeda tentang kebutuhan belajar dalam pikiran serta dukungan lingkungan yang lebih baik. Model ini akan
melahirkan objek pembelajaran menjadi lebih terorganisasi dan berjaringan (Diaz & McGee, 2006).


**Kehadiran Negara, Perlindungan Bangsa, dan Rasa Aman**

Prinsip nawacita pertama yaitu hadirnya kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Ada tiga kata kunci dalam nawacita pertama ini yang sangat relevan digunakan sebagai arah baru Pendidikan Kewarganegaraan. Tiga konsep ini sesungguhnya juga merupakan prinsip dasar dalam mewujudkan kesuksesan Pendidikan Kewarganegaraan di sebuah negara. Penulis mencoba merangkum tiga konsep ini sebagai satu kesatuan utuh yang mewarnai betapa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki posisi yang sangat sentral.


Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya

Nawacita kedua menekankan kepada adanya kepercayaan warga negara kepada pemerintah untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif, dan Demokratis. Prinsip kedua dalam Nawacita yang seperti ini merupakan bagian utuh yang menjadi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bentuk pembelajaran bagi warga negara untuk mendukung nilai-nilai ini. Pada hakikatnya, kepercayaan warga negara kepada pemerintahan bisa dimaknai dari dua sisi. Sisi pertama dimaknai sebagai awal proses terbentuknya pemerintahan yang bersih namun bisa juga dimaknai sebagai hasil dari proses pemerintahan yang dijalankan secara bersih. Bergantung bagaimana kita memilih sudut pandang ini dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan sat ini.

Ada dua sudut pandang yang bisa digunakan pendidikan kewarganegaraan dalam merancang dan memahami kepercayaan warga negara. Kepercayaan bisa muncul dari hasil proses tata pemerintahan yang dikelola secara bersih, efektif; dan demokratis. Tetapi kepercayaan juga bisa menjadi stimulus untuk lahirnya pemerintah yang bisa mengelola secara bersih, efektif, dan demokratis.

Membangun Indonesia Pinggiran, Memperkuat Desa, dan Negara Kesatuan

Terdapat tiga nilai utama yang terkandung dalam nawacita ketiga, yakni prioritas pembangunan Indonesia pinggiran, memperkuat kuat keberadaan desa, dan menjaga keutuhan negara kesatuan. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pilar utama pembangunan Indonesia adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi segenap entitas bangsa Indonesia. Membangun Indonesia dalam pemikiran ini tidak dimaknai hanya sekedar membangun infrastruktur ataupun infrastruktur secara fisik saja, tetapi jauh daripada itu yang lebih penting adalah pembangunan manusia Indonesia yang berkeadaban. Gagasan Nawacita yang memahami pembangunan Indonesia dari pinggiran merupakan bentuk lain dari apa yang disebut sebagai tindakan afirmatif.

Membangun Indonesia dari pinggiran memiliki makna yang sama dengan teori tentang negara rasial oleh James dan Redding (2005). Di jelaskan bahwa pembangunan negara merupakan komposisi dari berbagai macam institusi, kebijakan, kondisi dan aturan yang mendukung dan menghadirkan negara dalam hubungan sosial untuk mengingatkan bahwa setiap institusi adalah lembaga rasial yang berkaitan satu sama lain (James & Redding, 2005).

Kehadiran negara pada wilayah-wilayah pinggiran adalah salah satu bentuk arah baru yang harus dimasukkan dalam paradigma pendidikan kewarganegaraan. Proses pembelajaran yang terlalu simbolis sesuatu mereka merupakan praktik tidak hadirnya negara dalam kondisi yang dimanifestasikan dalam kebijakan negara yang terlalu berpusat di jawa saja. Hal inilah yang kemudian memunculkan adanya segregasi sosial antara warga negara yang berasal dari pinggiran dan warga negara yang berada di perkotaan yang pada akhirnya akan mengikis keutuhan Indonesia sebagai negara kesatuan.

1 Menolak Negara Lemah, Reformasi Sistem, Penegakan Hukum, Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya

Prinsip nawacita keempat menawarkan tema besar yang sangat multidimensi dalam kacamata politik pendidikan saat ini. Pendidikan kewarganegaraan saat ini seharusnya mendidik seluruh entitas bangsa Indonesia untuk menghadirkan negara yang kuat, dan menolak negara lemah terhadap kekuatan ekonomi politik yang tidak berpikah kepada bangsa. Di sisi lain, dalam rangka menghadirkan negara kuat, reformasi sistem adalah salah satu mekanisme yang harus diimpulkan untuk mengelola negara kuat seperti yang dicita-citakan.

Dalam rangka mendorong pendidikan kewarganegaraan sebagai kekuatan untuk menolak negara lemah, ada dua teori dasar yang bisa digunakan sebagai cara untuk mewujudkan negara kuat. Meminjam gagasan yang disampaikan oleh Lipset (2007) dijelaskan bahwa untuk membangun negara kuat membutuhkan adanya legitimasi dan efektifitas pemerintahan sebagai dimensi pembacaaan pendidikan kewarganegaraan yang integratif. Legitimasi dimaksudkan bahwa adanya dorongan warga negara kepada negara atau kekuatan negara kepada warga negara untuk menghasilkan dan menjaga kepercayaan politik dua pihak dalam ruang institusi politik yang secara nalar diterima dengan baik oleh masyarakat (Lipset, 2007).

Selanjutnya, untuk menolak negara lemah juga dibutuhkan adanya efektifitas sebagai konsekuensi logis atas legitimasi yang sudah membumi di sebuah pemerintahan. Efektifitas dalam bingkai ini dimaknai sebagai ukuran keberhasilan tentang kepuasan warga negara kepada pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sebagai kontrol atas kekuatan-kekuatan penting seperti aspek bisnis dan militer (Lipset, 2007). Efektifitas inilah yang menjadi perhatian penting bagaimana pendidikan kewarganegaraan nampaknya tidak hanya sekedar dimaknai sebagai doktrinasi nilai bagi warga negara, tetapi juga menjadi jiwa dalam membangun negara kuat dengan mekanisme reformasi sistem, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi. Mekanisme-mekanisme ini adalah proses untuk membangun pemerintahan yang bermartabat dan terpercaya sebagai indikator capaian negara kuat.
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia


Seharusnya, pendidikan kewarganegaraan dimaknai sebagai cara untuk membaskan manusia. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya sekedar mengajarkan kepada siswa di depan kelas dengan fasilitas teknologi yang sangat memadai, tetapi pendidikan kewarganegaraan juga dianggap sebagai praksis sosial yang memberikan bantuan untuk membebaskan manusia dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh (Freire, 2007).

Meningkatkan kualitas hidup manusia tidak hanya sekedar meningkatkan jenjang pendidikannya, tetapi bagaimana manusia Indonesia melalui pendidikan kewarganegaraan bisa keluar dari penjara metodologis yang menghambat mereka untuk menjawab tantangan dan masalah zaman yang terus berkembang. Pendidikan kewarganegaraan adalah misi strategis untuk menciptakan kondisi dimana negara menjadi bagian dari kebebasan manusia yang ada di dalamnya. Pendidikan kewarganegaraan adalah bentuk jihad untuk memperkuat individu melalui ilmu pengetahuan dan pengembangan keterampilan kritis dan nilai (Harland, 2009).

Pendidikan kewarganegaraan sebagai cara peningkatan kualitas hidup manusia sangat erat kaitannya dengan kebebasan manusia dalam pendidikan untuk berkontribusi terhadap perubahan sosial, dan mampu menjadikan dunia sebagai tempat terbaik untuk menjadi tempat tinggal manusia (Harland, 2009). Pendidikan kewarganegaraan seharusnya menjadi aktifitas yang dirancang untuk menanamkan kreativitas intelektual, otonomi dan kegembiraan. Dimensi ini sekaligus menjadi cara untuk berfikir kritis yang merupakan kombinasi dari intelektual yang luas dan spesialisasi ilmu pengetahuan.

Pendidikan kewarganegaraan seharusnya menjadi aktifitas yang komprehensif dan toleran terhadap keberagaman ide dan pengalaman yang menjadi sumber informasi partisipatif di dalam kehidupan masyarakat dan keterampilan komunikasi yang efektif (Harland, 2009). Menguatan peran pendidikan kewarganegaraan sebagai posisi sentral peningkatan kualitas hidup manusia adalah tuntutan sekaligus tanggung jawab yang secepatnya diubah arahnya agar mampu
bersinergi dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara seperti yang sudah termaktub dalam konstitusi.

Meningkatkan Produktivitas & Daya Saing Internasional

Nawacita keenam yang menjadi rujukan arah baru pendidikan kewarganegaraan saat ini adalah dengan meningkatkan produktifitas dan daya saing internasional bagi warga negara Indonesia. Mendudukkan pendidikan kewarganegaraan dalam konteks daya saing internasional sangat erat dengan ide tentang kompetisi global. Kompetisi global memiliki karakter yang dibentuk dari jaringan yang diikat oleh beberapa negara, institusi, dan masyarakat yang interdependen dalam rung ekonomi global (Deresky, 2002).

Untuk meningkatkan produktifitas dalam memenangkan daya saing internasional tidak mungkin mengesampingkan the invisible hand (tangan tak terlihat) dalam kompetisi global. Meningkatkan produktifitas tidak hanya sekedar manambah jumlah lapangan kerja atau tenaga kerjanya, tetapi juga berkaitan erat dengan fenomena peningkatan hilangnya batas-batas negara di dunia. Di tengah-tengah fenomena yang seperti ini, penulis berinisiatif memposisikan pendidikan kewarganegaraan sebagai cara untuk mendidik warga negara sebagai bagian dari wilayah global yang tanpa batas negara tersebut.

Pendidikan kewarganegaraan seharusnya menjadi alat politik pemerintahan untuk membangun kesadaran komunitas global bagi warga negara untuk menyadari kompetisi internasional saat ini. Praktik pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang sangat kaku yang hanya berbentuk doktrin hanya akan menciptakan warga negara yang tidak berbeda dengan robot-robot akademik dengan mekanisme kepatuhan kepada guru nya. Kondisi yang demikian ini akan semakin menyikirkkan warga negara Indonesia dalam pertarungan kompetisi global.

Pendidikan kewarganegaraan seharusnya bisa menjadi the invisible hand (tangan tak terlihat) untuk merancang kesiapan warga negara dalam proses memenangkan kompetisi global ini. Pendidikan kewarganegaraan jangan pernah dimaknai sebagai proses ritual yang tersakralisasi oleh produk yang bermama kurikulum. Sehingga, tidak ada dinamisasi dan kreasi yang muncul dari proses kewarganegaraan tersebut.

Merancang peningkatan produktifitas rakyat sama artinya dengan merancang partisipasi warga negara dalam pembangunan bangsa. Itu sebabnya, bukan hal yang tabu jika pendidikan kewarganegaraan dimaknai sebagai bagian yang terintegrasi dalam memainkan peran pertarungan global dengan basis produktifitas warga negara. Menarik kiranya jika pendidikan kewarganegaraan bisa menjadi the invisible hand (tangan tak terlihat) dalam propaganda nasional untuk meningkatkan daya saing internasional.
Kemandirian Ekonomi dan Menggerakkan Ekonomi Domestik

Nawacita ketujuh adalah dengan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Mengutip apa yang disampaikan oleh Fox, Fox, & Gilson (2016) dijelaskan bahwa strategi penguatan ekonomi domestik adalah dengan meningkatkan integrasi antara perusahaan dengan analisis dan pelaksanaan keamanan hukum domestik. Pada posisi ini, peran pendidikan kewarganegaraan menjadi sangat sentral, karena dari mekanisme yang terstruktur rapit akan memunculkan apa yang disebut sebagai gera ekonomi domestik. Di sisi lain, dukungan kuat dari pemerintah juga sangat penting sebagai bentuk kolaboratif antara lembaga pendidikan dengan kebijakan formal pemerintahan (Fox, Fox, & Gilson, 2016).

Selain membangun kemandirian ekonomi, hal lain yang dirasa cukup penting adalah dengan memperkuat sektor-sektor ekonomi lokal. Apa yang dijelaskan oleh Eisinger (1983) menekankan bahwa sesungguhnya kemandirian ekonomi hanya akan bisa dibangun apabila ada gerakan ekonomi lokal yang aktif. Di sisi lain, kecenderungan untuk mendorong ekonomi lokal yang berasal dari sektor-sektor vital adalah bagian dari kontribusi pendidikan sebagai corongnya pengembangan dan penelitian ekonomis di sebuah negara. Poin yang juga penting adalah bahwa pemerintah dibantu lembaga pendidikan harus mampu mengkondisi sumber daya yang tersedia untuk mendukung kepentingan ekonomi lokal (Eisinger, 1983).

Revolusi Karakter Bangsa

Ide nawacita kedelapan adalah berkaitan dengan revolusi karakter atau yang sering dikenal dengan revolusi mental. Prinsip ini nampaknya merupakan prinsip yang paling relevan dengan mekanisme tujuan diselenggarakanya pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Selain pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana untuk membebaskan manusia, pendidikan kewarganegaraan juga seharusnya menjadi konsep kondisi ideal seorang warga negara. pendidikan kewarganegaraan seharusnya menjadi pembaharu yang memperbaiki atau lebih akurat daripada kondisi warga negara yang sebelumnya (Goodwin, 2005).

Pendidikan kewarganegaraan seharusnya dimaknai sebagai semua praktik untuk pergantian, dan atau transformasi fundamental yang dilakukan oleh gerakan populer baik itu non reguler, ekstrakonstitusional, dan atau wacana gaya hidup (Goodwin, 2005). Dalam paradigma yang seperti ini, sangat tepat kiranya jika pendidikan kewarganegaraan yang dianggap sebagai revolusi karakter bangsa diterjemahkan tidak hanya sebagai mobilisasi massa dan perubahan rezim tetapi juga perubahan fundamental pada tataran sosial, ekonomi, budaya.

Revolusi karakter bangsa seharusnya menjadi gagasan utama bagi gerakan sosial di dalam Pendidikan kewarganegaraan. Oleh karena itu, sangat bijak rasanya jika pendidikan kewarganegaraan tidak cukup diposisikan pada tataran ceremonial saja, tetapi harus mengakar
kuat di setiap lini kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya Indonesia yang bermartabat. Memhami pendidikan kewarganegaraan sebagai strategi revolusi karakter adalah dengan menganggap proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas tidak dipenjara oleh ritual kurikulum atau tuntutan pemenuhan transkrip nilai, tetapi sebagai momentum untuk merevolusi apa yang ada di setiap kepala peserta didik sebagai subjek dan objek pendidikan kewarganegaraan di Indonesia saat ini.

**Memperteguh Kebhinnekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial**


Kedua, pendidikan kewarganegaraan seharusnya mampu membangun sentimen dan keterampilan warga negara dan kepemimpinan di era demokrasi keberagaman. Pemahaman merawat keberagaman adalah konsep dalam pengkonstruksi warga negara yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Itu sebabnya, sangat relevan nampaknya untuk mendorong pendidikan kewarganegaraan sebagai pengawal keberagaman dan demokrasi di Indonesia, baik dalam tataran teoritis dan tataran praktis.

**Simpulan**


Kedua, artikel ini juga berkesimpulan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus dibebaskan dari penjara formalitas. Pemikiran ini lebih mengupayakan bahwa proses mendidik warga negara
sebisa mungkin meminimalisir doktrinasi yang bersifat absolut. Mendidik warga negara harus dengan membebaskan warga negara menentukan apa dan bagaimana pendidikan kewarganegaraan dijalankan. Sehingga, pendidikan kewarganegaraan akan menemukan roh nya sebagai pendidikan yang demokratis, pendidikan yang memberikan kebebasan berekspresi bagi warga negara dalam mencapai arah baru pendidikan kewarganegaraan seperti termaktub dalam Nusantara. Pada kondisi ini diharapkan pendidikan kewarganegaraan tidak lagi dianggap sebagai mata kuliah atau pelajaran wajib, namun lebih daripada itu, pendidikan kewarganegaraan adalah kebutuhan dan keinginan bagi seluruh warga negaranya.
Daftar Isi


<table>
<thead>
<tr>
<th>Rank</th>
<th>Author(s)</th>
<th>Title</th>
<th>Journal</th>
<th>Year</th>
<th>Similarity Index</th>
<th>Words</th>
<th>Percentage</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Taufik H. Simatupang</td>
<td>&quot;Analisa Yuridis Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Pengelolaan dan Pelayanan Database Peraturan Perundang-Undangan di Daerah&quot;</td>
<td>Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum</td>
<td>2018</td>
<td>87</td>
<td>2%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Rebecca Chiyoko King-O'Riain</td>
<td>&quot;Counting on the 'Celtic Tiger'&quot;</td>
<td>Ethnicities</td>
<td>2007</td>
<td>38</td>
<td>1%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Karin Crawford</td>
<td>&quot;Influences on academics' approaches to development: voices from below&quot;</td>
<td>The International Journal for Academic Development</td>
<td>2010</td>
<td>31</td>
<td>1%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Wan Hu</td>
<td>&quot;Chapter 5 Context and Comparison of Translation Programmes in China and the UK: Market Forces, Global Positions and Curriculum Content&quot;</td>
<td>Springer Nature</td>
<td>2018</td>
<td>31</td>
<td>1%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Anoulak Kittikhoun</td>
<td>&quot;Small state, big revolution: geography and the revolution in Laos&quot;</td>
<td>Theory and Society</td>
<td>2009</td>
<td>28</td>
<td>1%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Josef Weidenholzer</td>
<td>&quot;The American and the European social dream: the competition of welfare regimes&quot;</td>
<td>Journal of Comparative Social Welfare</td>
<td>2008</td>
<td>27</td>
<td>1%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Coffé, Hilde, and Catherine Bolzendahl</td>
<td>&quot;Racial group differences&quot;</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Similarity Index:** 8%

**Primary Sources:**
- Karin Crawford. "Influences on academics' approaches to development: voices from below", The International Journal for Academic Development, 09/2010
- Coffé, Hilde, and Catherine Bolzendahl. "Racial group differences"
<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Authors</th>
<th>Title</th>
<th>Publisher</th>
<th>Year</th>
<th>Words</th>
<th>Percentage</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>8</td>
<td>Patricia McGee, Vicki Suter, Jennifer Gurrie.</td>
<td>&quot;chapter 10 Over the Rainbow&quot;</td>
<td>IGI Global</td>
<td>2005</td>
<td>22</td>
<td>&lt; 1%</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Bas de Jong.</td>
<td>&quot;Can Fluctuations in Prices or Volumes of a Security Trigger a Duty for Listed Companies to Disclose Inside Information?&quot;</td>
<td>European Business Organization Law Review</td>
<td>2016</td>
<td>15</td>
<td>&lt; 1%</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Insan Firdaus.</td>
<td>&quot;Optimalisasi Pos Lintas Batas Tradisional dalam Pelaksanaan Fungsi Keimigrasion Studi Kasus Imigrasi Entikong&quot;</td>
<td>Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum</td>
<td>2018</td>
<td>15</td>
<td>&lt; 1%</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Christine Clark, Gwen Stowers.</td>
<td>&quot;chapter 5 Speaking with Trunks, Dancing with the “Pink Elephants”&quot;</td>
<td>IGI Global</td>
<td>2016</td>
<td>12</td>
<td>&lt; 1%</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Ais - Irmawati, Udik Budi Wibowo, Arum Dwi Hastutiningsih.</td>
<td>&quot;PERAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DALAM MENGURANGI BUTA AKSARA DI KABUPATEN KARIMUN*)&quot;</td>
<td>Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan</td>
<td>2017</td>
<td>12</td>
<td>&lt; 1%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Igor Fedyukin. ""Westernizations" from Peter I to Meiji: war, political competition, and institutional change", Theory and Society, 2018